



Rekonstruksi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Merdeka Belajar

Shindid Gunagraha ✉, UIN Raden Mas Said Surakarta

Rustam Ibrahim, UIN Raden Mas Said Surakarta

✉ shindidgunagraha@gmail.com

Abstract: National education in Indonesia has a very complex dynamic in answering the needs of the times. Various challenges and increasingly complex problems make the education system undergo adjustments through policies. This condition encourages reconstruction through the independent learning policy initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an offer for educational transformation in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the independent learning policy in terms of regulations, principles, programs, and implementation of curriculum aspects, national assessments, strengthening the role of teachers and driving schools, and independent campuses in the scope of higher education. This research method uses *library research*. The results of the study show that the independent learning policy directs advanced education and is adaptive to technology with the conditions of the times. In addition, there are still many challenges and obstacles in the real implementation of independent learning in the field. Overall, the policy of independent learning as a strategy for the advancement of national education still needs evaluation, especially real implementation in the field.

Keywords: Education Reconstruction, National Education, Transformation, Policy, Freedom of Learning

Abstrak: Pendidikan nasional di Indonesia memiliki dinamika yang sangat kompleks dalam menjawab kebutuhan zaman. Berbagai tantangan permasalahan yang semakin kompleks menjadikan sistem pendidikan mengalami penyesuaian melalui kebijakan. Kondisi tersebut mendorong adanya rekonstruksi melalui kebijakan merdeka belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai tawaran untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Tujuan penelitian ini menganalisis kebijakan merdeka belajar dari segi regulasi, prinsip, program, dan implementasi dari aspek kurikulum, asessment nasional, penguatan peran guru dan sekolah penggerak, serta kampus merdeka di lingkup pendidikan tinggi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan merdeka belajar mengarahkan pendidikan yang maju serta adaptif terhadap teknologi dengan kondisi perkembangan zaman. Selain itu, masih banyak tantangan dan hambatan dalam implementasi nyata merdeka belajar di lapangan. Secara keseluruhan, kebijakan merdeka belajar sebagai strategi kemajuan pendidikan nasional yang masih perlu adanya evaluasi khususnya implementasi nyata di lapangan.

Kata kunci: Rekonstruksi Pendidikan, Pendidikan Nasional, Transformasi, Kebijakan, Merdeka Belajar

Received 19 September 2025; **Accepted** 25 November 2025; **Published** 30 November 2025

Citation: Gunagraha, S., & Ibrahim, R. (2025). Rekonstruksi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 5 (04), 985-1000.



Copyright ©2025 Jurnal Jendela Pendidikan

Published by CV. Jendela Edukasi Indonesia. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional di Indonesia terus mengalami transformasi seiring dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada era disrupsi teknologi, serta perubahan paradigma pembangunan manusia menuntut hadirnya sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan (Retnaningrum et al., 2023). Dalam konteks tersebut, kebijakan *Merdeka Belajar* yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hadir sebagai upaya rekonstruksi pendidikan nasional, melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Selain itu, melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (Muhammad Rusli, 2021). Kebijakan ini bertujuan melahirkan ekosistem pembelajaran yang fleksibel, mengedepankan kemandirian, kreativitas, dan penguatan karakter peserta didik melalui Profil Pelajar Pancasila. Namun, realitas implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai problematika yang perlu dikaji secara kritis berkaitan dengan beberapa kesenjangan yang terjadi.

Perubahan yang terjadi memang sangat baik dampaknya bagi kemajuan pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tetapi terlepas dari kondisi dan iklim masyarakat yang berubah ditengah krisis modernisasi baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Perubahan kebijakan yang muncul terkadang menjadikan polemik di ruang publik disebabkan oleh komunikasi serta pemahaman yang tidak lengkap dan jelas, sehingga menjadikan hambatan dalam proses pelaksanaanya (Sumarmi, 2023). Meskipun gagasan *Merdeka Belajar* menawarkan paradigma baru, dalam praktiknya terdapat sejumlah tantangan diantaranya; pertama, kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah maju dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang menghambat pemerataan implementasi (Hattarina, Sailya, Faradila, Putri, & Putri, 2022). Sebab masih terdapat daerah yang perlu perhatian khusus pemerintah untuk melengkapi fasilitas yang layak sebagai sarana dan prasarana untuk merealisasikan kebijakan. Infrastruktur bukan hanya sekedar bangunan yang layak akan tetapi akses internet dalam keterpaduan ruang digital. Adanya hasil riset disebutkan bahwa 39,7% sekolah dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Indonesia belum memiliki akses internet. Angka tersebut mengindikasikan akses digital berdampak pada penerapan metode pembelajaran modern dengan integrasi teknologi.

Kedua, ketidaksiapan guru dan tenaga pendidik dalam memahami konsep esensial kebijakan ini, fenomena yang terjadi di lapangan terkhusus di lembaga pendidikan sekolah dasar dan menengah, sebagian guru masih terfokus pada beban administrasi yang dikerjakan (Windayanti et al., 2023). Hal ini berdampak pada aspek psikologis guru dalam merespon perubahan melalui kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Sebab jika guru dan tenaga pendidik tidak siap akan kebijakan yang akan dilaksanakan maka akan menjadi faktor dasar terhambatnya realisasi merdeka belajar pada lembaga pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Meskipun banyak guru yang siap untuk mensuksekan kebijakan merdeka belajar, tetapi yang menjadi tantangan besar adalah bagaimana mempersiapkan guru secara bertahap dan berkelanjutan. Ketiga, adanya faktor iklim pendidikan terkait belum kuatnya fondasi filosofis yang membumbui dalam budaya pendidikan nasional. Selain itu, adanya kebijakan yang berlaku masih terdapat indikasi terkait rendahnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, khususnya pada pendidikan vokasi.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan untuk mengaitkan pada kebutuhan manusia terkhusus pada abad-21. Kemudian adanya disparitas asesmen dan kualitas pembelajaran di tingkat formal maupun nonformal menjadi tantangan besar pendidikan nasional dalam kebijakan merdeka belajar. Ketimpangan kualitas pembelajaran antar daerah sekolah di perkotaan dan daerah 3T sehingga ini menjadi permasalahan dalam kualitas pembelajaran yang terdapat di lembaga pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Beberapa faktor kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: sejauh

mana kebijakan *Merdeka Belajar* dapat direkonstruksi agar mampu menjawab tantangan pendidikan nasional secara komprehensif?.

Adanya kajian penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya *Merdeka Belajar* sebagai terobosan kebijakan pendidikan. Terdapat hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan ini mendorong penyederhanaan administrasi guru dan penghapusan Ujian Nasional (UN) kemudian munculnya Asesmen Nasional Berbasis Komputer (Lembong, Lumapow, & Rotty, 2023). Studi penelitian sebelumnya menyoroti relevansi *Merdeka Belajar* dengan era disruptif yang menuntut fleksibilitas pembelajaran (Pahru & Latif, 2022). Sementara itu, penelitian sebelumnya menemukan bahwa adanya hambatan signifikan di wilayah 3T akibat keterbatasan infrastruktur dan kesiapan institusi (Sadewo, Dimmera, & Purnasari, 2022). Di sisi lain, sebagian penelitian mengkritisi landasan filosofis kebijakan merdeka belajar yang belum sepenuhnya membumi secara konseptual. Dengan demikian, penelitian sebelumnya umumnya fokus pada analisis implementasi teknis dan tantangan praktis, sementara rekonstruksi filosofis, konseptual, dan strategis kebijakan *Merdeka Belajar* dalam bingkai pendidikan nasional masih terbatas. Adanya penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi pelaksanaan pada kurikulum merdeka (Setiawan, Sholeh, Nurrahman, & Nurfatmawati, 2023).

Gagasan rekonstruksi pendidikan nasional dengan kebijakan Merdeka Belajar dipahami sebagai upaya perbaikan sistematis terhadap kurikulum, manajemen, metode pembelajaran, serta tata kelola pendidikan agar sesuai dengan tuntutan zaman jangan sampai sebatas slogan transformasi pendidikan (Hendri, 2020). Merdeka Belajar diposisikan bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan paradigma baru pendidikan yang menekankan kemandirian belajar peserta didik, penguatan karakter berbasis nilai pancasila atau dikenal dengan profil pelajar pancasila, diferensiasi pembelajaran yang menghargai keberagaman, dan sinergi antara pendidikan formal, nonformal, serta dunia industri (Nadia, Desyandri, & Erita, 2022). Gagasan merdeka belajar menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses pengembangan manusia seutuhnya yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan geografis siswa.

Dinamika perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia menuntut guru untuk selalu adaptif. Guru adaptif yaitu guru yang tidak menolak adanya perubahan yang bersifat berkembang. Dalam konteks ini, posisi guru menjadi sangat strategis. Jika sebelumnya guru lebih banyak berperan sebagai *transmitter of knowledge*, maka melalui kebijakan Merdeka Belajar, guru dituntut bertransformasi menjadi *teacher adaptif*. Seorang *teacher adaptif* memiliki kemampuan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa, kondisi sosial-budaya setempat, serta perkembangan teknologi pendidikan. Hal ini menuntut keterampilan pedagogis baru, literasi digital, kemampuan berpikir reflektif, dan kesiapan untuk terus belajar sepanjang hayat. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama. Tantangan muncul berupa keterbatasan kompetensi teknologi, beban administratif yang tinggi, serta resistensi terhadap perubahan pola pembelajaran konvensional. Kondisi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), persoalan semakin kompleks dengan keterbatasan sarana prasarana dan akses internet.

Situasi ini mengindikasikan terdapat kesenjangan antara idealitas kebijakan Merdeka Belajar dengan praktik nyata di lapangan. Dengan demikian, urgensi penelitian tentang Merdeka Belajar dan tuntutan guru sebagai *teacher adaptif* terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana guru merespons kebijakan ini, sejauh mana kapasitas adaptif dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan, serta bagaimana kebijakan pendidikan dapat dirancang agar lebih kontekstual sesuai dengan keragaman kondisi sekolah di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan *Merdeka Belajar* dapat meningkatkan perkembangan pendidikan di Indonesia melalui berbagai program untuk menghadirkan sistem pendidikan nasional yang lebih adil, relevan, dan berdaya saing global. Kajian penelitian ini sangat penting dilakukan karena mengkaji pendidikan adalah pilar utama pembangunan suatu bangsa melalui sumber daya manusia. Tanpa

rekonstruksi yang kuat, kebijakan *Merdeka Belajar* berpotensi hanya menjadi jargon kebijakan tanpa adanya dampak substantif yang terealisasi nyata dan dapat dirasakan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebijakan pendidikan dan memperkaya diskursus akademik tentang rekonstruksi pendidikan nasional melalui merdeka belajar, serta menganalisis program-program dalam terwujudnya konsep merdeka belajar. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat praktis dalam memberikan peta jalan implementasi *Merdeka Belajar* yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji tentang kebijakan kurikulum merdeka belajar melalui pendekatan studi penelitian literatur yang dilakukan melalui pengumpulan, pengkajian, serta analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian (Hamzah, 2019). Sumber data penelitian terdiri dari dokumen kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, peraturan-peraturan undangan terkait sistem pendidikan nasional, serta publikasi akademik berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas pendidikan nasional dan kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk memperkaya kajian penelitian yang mendukung dan relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan Scopus. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, otoritas penulis atau lembaga penerbit, serta keterbaruan informasi.

Data diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, seperti konsep pendidikan nasional, filosofi merdeka belajar, program kebijakan merdeka belajar dan analisis implementasi kebijakan. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk menemukan gagasan pokok, pola, dan keterkaitan antar konsep dalam sastra (Krippendorff, 2004). Proses ini meliputi reduksi data untuk menyaring data penting, penyajian data dalam deskripsi naratif yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan untuk merekonstruksi gagasan informasi pendidikan nasional berbasis kebijakan merdeka belajar. Teknik validitas hasil penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan mengurangi potensi bias interpretasi.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan merdeka belajar menjadi suatu transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Hakikat kebijakan merdeka belajar adalah paradigma kebijakan pendidikan yang menempatkan pada kemandirian siswa sebagai inti proses belajar. Landasan munculnya merdeka belajar yaitu humanisme pendidikan dengan menghargai potensi unik setiap individu dan memposisikan siswa sebagai subjek aktif bukan hanya objek pasif dalam pembelajaran (Majid, 2024). Bahwa pada hakikatnya kebijakan ini bukan sekedar perubahan kurikulum, melainkan rekonstruksi tujuan, proses, serta tata kelola pendidikan agar lebih relevan terhadap dinamika tuntutan abad-21.

Pada hasil penelitian ini membatasi serta menyoroti kebijakan merdeka belajar terhadap implementasi di sekolah dasar dan menengah melalui kurikulum yang lebih fleksibel yaitu kurikulum merdeka. Adanya rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020. Kurikulum merdeka memiliki tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Secara umum karakter kurikulum merdeka sangat menekankan pada pengembangan kompetensi siswa abad-21. Memang secara proses

kurikulum merdeka memiliki sifat fleksibilitas dalam pelaksanaan pada setiap jenjang pendidikan. Fleksibel yang dimaksudkan adalah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah khazanah keilmuan serta visi misi satuan pendidikan. Adanya tuntutan kompetensi pada abad-21 tersebut diantaranya *critical thinking, creativity, colaboratif*, dan *comunication* serta adanya integrasi atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran (Cahya et al., 2023).

Implementasi pembelajaran yang diterapkan di sekolah sangat difokuskan pada pengembangan kompetensi berpikir kritis atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) sebagai kebutuhan mendasar dalam merespon kejadian suatu peristiwa yang terjadi di era modern (Jaenudin, Chotimah, Farida, & Syarifuddin, 2020). Oleh karena itu, transformasi pendidikan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjawab berbagai permasalahan kompleks. Namun, perlu adanya bahan evaluasi serta pertimbangan yang jelas terkait implementasinya agar dapat berdampak secara nyata di pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi.

Kebijakan merdeka belajar berdampak pada perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, memunculkan adaptasi proses implementasi pembelajaran yang berubah. Kurikulum merdeka munculnya integrasi keterampilan sosial emosional atau biasa dikenal dengan KSE yang dikembangkan oleh guru terhadap peserta didik. Keterampilan sosial emosional membantu dalam proses penguatan karakter, sehingga diharapkan berdampak pada siswa di kehidupan sehari-hari. Keterampilan sosial emosional KSE mencakup keterampilan kesadaran diri, kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam Kurikulum Merdeka, KSE dipandang sebagai fondasi karakter yang mendukung Profil Pelajar Pancasila. Selain itu, adanya integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung program digitalisasi di Indonesia. Digitalisasi pendidikan dilakukan dengan adanya akun belajar.id yang dimiliki oleh siswa dan guru.

Berbagai bentuk program untuk terealisasinya kebijakan merdeka belajar menjadi bukti nyata kebijakan yang dapat berdampak nyata pada setiap elemen dunia pendidikan. Adanya program yang mendukung terwujudnya kebijakan merdeka belajar beberapa program di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi sebagai berikut:

TABEL 1. Program Kebijakan Merdeka Belajar

Bidang Pendidikan	Bentuk Program	Tujuan
Pendidikan Dasar dan Menengah	Asesmen Nasional (AN)	Mengukur mutu pendidikan (literasi, numerasi, survey karakter, dan survey lingkungan belajar)
	Kurikulum Merdeka	Memberikan fleksibilitas pembelajaran yang berpusat pada siswa
	Sekolah Penggerak	Transformasi sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara holistik
	Guru Penggerak	Pelatihan guru menjadi pemimpin pembelajaran inovatif dan kolaboratif
	Digitalisasi Sekolah (Platform Merdeka Mengajar)	Mendukung guru dalam merancang pembelajaran digital dalam meningkatkan akses pendidikan
	Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Kampus Mengajar	Memberikan pengalaman lintas budaya serta menguatkan wawasan kebhinekaan Pemberdayaan mahasiswa untuk berkontribusi di sekolah dalam pengajaran dan literasi
Pendidikan Tinggi (Kampus Merdeka)	KKN Tematik	Mendorong kontribusi dalam pembangunan masyarakat desa

Proyek Kemanusiaan	Melibatkan dalam aksi sosial dan kemanusiaan	
Program Wirausaha Merdeka	Mengembangkan prinsip atau jiwa wirausaha	
Karakter	Profil Pelajar Pancasila	Membentuk generasi beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebhinekaan global

Dari tabel di atas terdapat beberapa bentuk program yang menjadi peta jalan kebijakan merdeka belajar. Pada tabel program kebijakan merdeka belajar, peneliti menyoroti beberapa lima program yang menjadi kajian analisis pada hasil penelitian ini dengan fokus memperdalam analisis penelitian, sebagai berikut:

1. Sekolah Penggerak

Sekolah Penggerak (SP) dirancang sebagai program transformasi satuan pendidikan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran secara holistik dengan fokus pada peningkatan kompetensi guru, praktik pembelajaran berpusat pada murid, dan penerapan Profil Pelajar Pancasila. Intervensi tipikal diantaranya; pelatihan, pendampingan mentor (*coaching*), workshop, dan pembentukan manajemen sekolah baru. Sekolah penggerak berfungsi sebagai lokomotif transformasi pendidikan nasional, di mana praktik baik yang dijalankan diharapkan menjadi model bagi sekolah-sekolah lain. Posisi strategis ini menjadikan sekolah penggerak bukan hanya penerima program, melainkan agen perubahan dengan kontribusi berupa; penerapan kurikulum yang lebih fleksibel dan berpusat pada murid, penguatan kompetensi guru, dan penguatan kepemimpinan sekolah dalam membangun belajar adaptif.

Beberapa studi evaluatif kasus dan studi CIPP (*Context-Input-Process-Product*) pada batch implementasi SP melaporkan hasil positif pada aspek kapasitas guru, pengelolaan sekolah, dan praktik pembelajaran yang lebih inovatif terutama pada sekolah yang mendapat dukungan intensif dan mempunyai basis sumber daya relatif baik (Novayanti, Warman, & Dwiyono, 2023). Namun efektivitasnya tidak merata: beberapa sekolah hanya menunjukkan perubahan administratif, sementara peningkatan hasil belajar siswa lebih signifikan pada sekolah yang menerima pendampingan berkelanjutan dan dukungan infrastruktur. Resiko ketimpangan yang terjadi adalah sekolah penggerak berpotensi semakin maju, sementara sekolah non-penggerak tetap tidak ada strategi kemajuan yang diperhatikan secara khusus. Sebab hanya sekolah penggerak memposisikan dirinya sebagai model rujukan bagi sekolah lain dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Dengan demikian, implementasi sekolah penggerak membawa arah baru dalam transformasi pendidikan Indonesia dengan menekankan kurikulum fleksibel, pembelajaran berbasis kompetensi, dan kepemimpinan sekolah yang inovatif. Meskipun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan pada kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta pemerataan antarwilayah. Agar berkelanjutan untuk evaluasi perbaikan mendatang, sekolah penggerak tidak hanya dilihat sebagai “proyek unggulan,” tetapi sebagai katalis yang mendorong perubahan sistemik di seluruh satuan pendidikan.

2. Guru Penggerak

Guru penggerak adalah guru yang dipilih dan diberdayakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan ekosistem pendidikan di sekitarnya. Program Guru Penggerak (PGP) adalah program pengembangan kepemimpinan pembelajaran bagi guru untuk menjadi agen perubahan; melibatkan pelatihan intensif, pengalaman praktik, dan pembentukan jejaring guru pemimpin. Secara filosofis, guru penggerak bukan hanya label administratif, melainkan simbol transformasi peran guru (Ningrum & Suryani, 2022). Istilah ini mengandung makna bahwa guru menggerakkan diri sendiri untuk terus belajar,

berinovasi, dan beradaptasi. Menggerakkan siswa agar belajar dengan merdeka, sesuai minat dan potensinya. Menggerakkan lingkungan sekolah dan komunitas menuju budaya belajar yang kolaboratif.

Evaluasi-evaluasi awal dan studi oleh lembaga independen menunjukkan bahwa PGP meningkatkan kompetensi pedagogis, kesadaran reflektif, dan kepemimpinan instruksional peserta. Guru penggerak dituntut untuk merancang pembelajaran berorientasi pada murid, mendorong kreativitas, berpikir kritis, serta mengembangkan karakter siswa melalui Project Profil Pelajar Pancasila. Guru tersebut berperan sebagai *role model* bagi guru lain dalam praktik inovasi pendidikan. Sehingga adanya guru penggerak dapat menumbuhkan guru yang adaptif dalam menerima setiap perubahan yang terjadi.

Guru penggerak membimbing rekan sejawat untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, asesmen autentik, dan kurikulum fleksibel. Oleh karena itu, guru tersebut sangat berperan sebagai penggerak transformasi budaya sekolah menuju lingkungan belajar yang lebih adaptif dan kolaboratif. Terdapat peningkatan kemampuan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan melakukan coaching kepada rekan sejawat. Posisi ini menegaskan fungsi guru penggerak sebagai agen yang menjembatani kebijakan pusat dengan praktik di lapangan. Namun, faktanya cakupan peserta masih terbatas dibanding total populasi guru nasional, sehingga dampak sistemik akan tergantung pada skala dan strategi diseminasi.

Dengan demikian, Peran guru penggerak dalam kebijakan Merdeka Belajar sangat signifikan: mereka adalah katalis inovasi pembelajaran, mentor sejawat, penghubung antara kebijakan dan praktik, sekaligus agen transformasi budaya sekolah. Dampak nyatanya terlihat pada siswa yang lebih merdeka, guru yang lebih adaptif, dan sekolah yang lebih kolaboratif. Makna guru penggerak adalah makna filosofis bahwa seorang guru harus terus bergerak: untuk belajar, menginspirasi, dan membawa perubahan nyata dalam dunia pendidikan.

3. Profil Pelajar Pancasila

Profil pelajar pancasila menjadi sorotan kebijakan merdeka belajar sebagai langkah dalam penguatan karakter siswa. Perubahan kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum merdeka mengharuskan sekolah mengalokasikan proses penguatan project profil pelajar pancasila dalam muatan pembelajaran. Hal ini merupakan suatu fokus terbaru dalam dinamika pendidikan di Indonesia. Kebijakan Merdeka Belajar lahir sebagai respon terhadap kebutuhan transformasi pendidikan di Indonesia yang masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kualitas, dominasi pembelajaran berbasis kognitif, serta rendahnya kompetensi abad 21 pada siswa. Kurikulum sebelumnya dianggap terlalu padat materi, berorientasi ujian, dan kurang mengembangkan dimensi karakter serta keterampilan non-kognitif.

Oleh karena itu, Kemendikbudristek memperkenalkan Profil Pelajar Pancasila sebagai arah baru pendidikan nasional yang mentransformasikan karakter, sikap, dan kompetensi sosial. Profil ini menjadi gambaran ideal lulusan yang diharapkan sistem pendidikan Indonesia: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhhlak mulia; berkebhinekaan global; bergotong-royong; mandiri; bernalar kritis; serta kreatif. Peneliti memberikan gambar untuk mempermudah pemahaman terkait enam Profil Pelajar Pancasila sebagai berikut:

**GAMBAR 1.** *Profil Pelajar Pancasila*

Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) lahir sebagai instrumen implementasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran. Melalui P5, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter, sikap, dan kompetensi relevan dengan tantangan abad ke-21 dan realitas sosial budaya Indonesia. Dalam ruang kurikulum merdeka P5 bukan mata pelajaran, melainkan aktivitas kegiatan berbasis proyek lintas disiplin yang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi isu aktual, kearifan lokal, dan permasalahan global. Penerapan aktivitasnya sangat terdapat penguatan karakter untuk bersifat kolaboratif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Adanya P5 diharapkan mampu menyeimbangkan kompetensi kognitif dengan dimensi karakter dan keterampilan hidup (*life skills*).

4. Kurikulum Merdeka

Perubahan dari kurikulum 2013 sebelumnya yang menekankan pada standar baku, penguasaan materi akademik, serta pencapaian nilai ujian sebagai ukuran keberhasilan pendidikan. Hal ini sering kali memiliki keterbatasan kreativitas guru dan siswa karena metode serta isi pembelajaran ditentukan secara seragam di seluruh Indonesia. Sehingga hadirnya kurikulum merdeka sebagai upaya mengatasi keterbatasan yang ada serta membangun paradigma tersebut dengan memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan. Sekolah dan guru diberi ruang untuk merancang kurikulum operasional, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, serta mengintegrasikan potensi lokal dalam proses belajar.

Maka dari itu dalam kurikulum tersebut menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses pengembangan manusia seutuhnya yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan geografis peserta didik. Dalam kerangka kurikulum merdeka terdapat penekanan pada pengembangan kompetensi abad 21, suatu keberhasilan pendidikan tidak sekedar melalui aspek kognitif, tetapi pada keterampilan (*psikomotorik*) hidup yang relevan dengan tantangan global abad-21.

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu bentuk rekonstruksi pendidikan nasional yang lahir dari kebijakan Merdeka Belajar. Latar belakang lahirnya kurikulum ini tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk membangun generasi yang adaptif terhadap perubahan global, sekaligus tetap diterapkan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, serta berbasis pada potensi dan kebutuhan murid. Secara kontekstual, Kurikulum Merdeka mengusung paradigma pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student center*) dengan menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Karakteristik utamanya dapat dilihat dari tiga hal pokok, yakni penyederhanaan konten agar lebih esensial, kesamaan bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks sosial dan geografis, serta penekanan pada pembelajaran berbasis proyek melalui *Projek Profil Pelajar Pancasila*.

Pendekatan ini menggeser pendidikan dari model pengajaran yang seragam menuju pola diferensiasi, di mana guru dituntut untuk menyesuaikan metode, materi, dan

penilaian dengan keragaman kemampuan, minat, serta gaya belajar siswa. Dalam kerangka ini, konsep Kompetensi Sosial Emosional (KSE) juga menjadi landasan penting yang muncul bersamaan dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Pengembangan keterampilan non-kognitif seperti kesadaran diri, empati, regulasi emosi, serta kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat. Hal ini sesuai dengan arah pendidikan holistik yang tidak hanya menilai siswa dari aspek akademik, tetapi juga dari kapasitasnya menjadi manusia yang berkarakter, toleran, dan siap menghadapi dinamika sosial. Dengan memasukkan KSE, Kurikulum Merdeka berusaha memastikan bahwa proses belajar tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial.

Selain itu, diferensiasi menjadi ciri penting dari Kurikulum Merdeka yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya. Diferensiasi di sini bermakna bahwa guru tidak lagi menggunakan satu pendekatan yang seragam untuk seluruh siswa, tetapi menyediakan pengalaman belajar yang beragam sesuai kebutuhan dan potensi individu. Melalui diferensiasi konten, proses, dan produk, pembelajaran menjadi lebih inklusif serta memberikan kesempatan yang adil bagi setiap murid untuk berkembang. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya berbicara tentang kebebasan belajar dalam arti struktural, melainkan juga kebebasan pedagogis yang memungkinkan siswa menemukan jalannya sendiri dalam belajar.

Integrasi teknologi digital menjadi aspek lain yang tidak terpisahkan dari implementasi Kurikulum Merdeka. Transformasi pendidikan di era digital menuntut penggunaan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, melainkan sebagai ruang belajar baru. Platform digital, aplikasi pembelajaran, hingga ekosistem dare memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses sumber belajar yang lebih luas, melaksanakan asesmen berbasis data, serta mendorong kolaborasi lintas ruang dan waktu. Integrasi digital ini sejalan dengan misi Merdeka Belajar, yaitu memerdekakan proses pendidikan dari pembatasan ruang kelas konvensional dan menjadikannya lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Analisis dari keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan perwujudan konkret dari kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum tersebut mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, integrasi teknologi, serta penguatan karakter melalui KSE dan Profil Pelajar Pancasila. Semua ini menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia sedang bergerak dari sekedar transfer pengetahuan menuju terbentuknya manusia seutuhnya, yang merdeka dalam berpikir, merdeka dalam belajar, dan merdeka dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan konteks kehidupan nyata.

5. Asesmen Nasional

Asesmen Nasional merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan Merdeka Belajar yang menggantikan Ujian Nasional. Secara ilmiah, Asesmen Nasional diposisikan bukan sebagai alat seleksi atau penentu kelulusan siswa, melainkan sebagai mekanisme evaluasi sistem pendidikan yang fokus pada kualitas pembelajaran dan iklim sekolah. Dengan demikian, orientasi Asesmen Nasional beralih dari pengukuran pencapaian individu semata menjadi evaluasi menyeluruh terhadap mutu pendidikan di tingkat sekolah dan daerah. Fokus utama Asesmen Nasional terhadap siswa diwujudkan melalui tiga komponen utama. Pertama, Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) yang mengukur literasi membaca dan numerasi.

AKM tidak lagi menekankan hafalan konten, melainkan menguji kemampuan bernalar, memahami informasi, serta memecahkan masalah dalam berbagai konteks. Hal ini sejalan dengan tuntutan keterampilan abad 21, dimana siswa dituntut berpikir kritis dan adaptif, bukan sekedar mengingat pengetahuan faktual. Kedua, Survei Karakter , yang memancarkan internalisasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, seperti religiusitas, integritas, gotong royong, dan kemandirian. Survei ini memberikan gambaran sejauh mana pendidikan di sekolah mampu menumbuhkan dimensi afektif dan moral siswa. Ketiga, Survei Lingkungan Belajar , yang mengukur kualitas proses belajar mengajar, iklim

kelas, iklim sekolah, serta praktik kepemimpinan yang berpengaruh pada perkembangan siswa.

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Asesmen Nasional dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, peningkatan kualitas pembelajaran . Dengan hasil AKM, guru dan sekolah memperoleh informasi diagnostik yang dapat digunakan untuk memperbaiki strategi mengajar dan diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Kedua, penguatan karakter. Survei karakter memberi gambaran tentang kondisi faktual internalisasi nilai-nilai persahabatan pada peserta didik, sehingga sekolah dapat merancang intervensi pendidikan karakter yang lebih kontekstual. Ketiga, pemerataan mutu pendidikan. Asesmen Nasional memberikan tujuan data lintas sekolah dan daerah, sehingga pemerintah dapat merancang kebijakan berbasis bukti untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan, khususnya di daerah 3T. Keempat, akuntabilitas publik. Hasil Asesmen Nasional perlu ditekankan bukan ditujukan untuk memberi label pada siswa, melainkan sebagai umpan balik bagi sekolah, orang tua, dan masyarakat mengenai mutu layanan pendidikan.

Dapat disimpulkan, bahwa Asesmen Nasional merupakan instrumen evaluatif yang menempatkan siswa sebagai pusat perhatian tanpa menjadikan mereka sebagai objek yang diukur semata. Fungsi utamanya adalah menciptakan *feedback loop* antara hasil asesmen dengan perbaikan sistem pendidikan. Dengan demikian, asesmen ini selaras dengan paradigma Merdeka Belajar yang menekankan kebebasan, relevansi, dan peningkatan kualitas pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar pencapaian nilai ujian.

PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini menguraikan secara lebih mendalam temuan penelitian dengan beberapa penelitian atau hasil empiris di lapangan. Hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya tidak hanya dipahami sebagai deskripsi fenomena. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk melihat secara kritis kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan praktik nyata di lapangan. Kesenjangan ini penting diungkapkan karena akan memberikan kontribusi terhadap evaluasi kebijakan serta penentuan rekomendasi strategi bagi pemangku kepentingan. Dengan menelaah hasil penelitian melalui perspektif teoritis dan empiris, bagian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai rekonstruksi pendidikan nasional melalui kebijakan Merdeka Belajar sekaligus mempertegas manfaat praktis penelitian dalam memberikan peta jalan implementasi yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Indonesia. Peneliti merumuskan fokus analisis hasil penelitian sebagai berikut:

A. Rekonstruksi Pendidikan Nasional melalui Kurikulum Merdeka

Konsep “*rekonstruksi*” sebagai perbaikan paradigma pendidikan nasional yang sebelumnya berorientasi *input-output* menuju paradigma berbasis kompetensi dan kemandirian (Gouédard, Pont, Hyttinen, & Huang, 2020). Sehingga merubah pola pembelajaran di lembaga pendidikan yang memfokuskan pembelajaran pada siswa melalui kurikulum merdeka. Integrasi nilai Profil Pelajar Pancasila dalam rekonstruksi sistem pendidikan nasional. Paradigma kurikulum merdeka sebagai rekonstruksi kemajuan pendidikan yang melakukan perubahan dengan berbasis kompetensi esensial, berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan diferensiasi. Sebelum adanya kurikulum merdeka terdapat kurikulum 13 dimana paradigma utama yaitu berbasis kompetensi, mengintegrasikan sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) (Darlis, Sinaga, Perkasyah, Sersanawawi, & Rahmah, 2022).

Tiga formula sebenarnya memudahkan fokus guru terhadap optimalisasi pengembangan kompetensi siswa yang sebenarnya sangat memungkinkan relevan dengan kondisi transformasi digitalisasi. Melalui pendekatan pembelajaran saintifik yang dimana menekankan pada pendekatan saintifik (5M: Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, Mengomunikasikan). Sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik dan

karakter yang terarah. Karena dalam struktur KD (Kompetensi Dasar) secara rinci dan normatif dan sangat menekankan kompetensi terpadu (Wati, Kabariah, & Adiyono, 2022). Sedangkan kurikulum merdeka menekankan pada humanisme pendidikan dan pendekatan kapabilitas: memperluas kebebasan nyata peserta didik untuk memilih jalur pembelajaran yang bermakna (Arma & Ismail, 2024). Tujuannya lebih eksplisit menghubungkan kompetensi abad-21 dengan Profil Pelajar Pancasila.

Memang perubahan menuju kemajuan sangatlah baik, kontribusi kurikulum merdeka yaitu menggeser fokus dari “memenuhi semua KD” menjadi penguatan kompetensi esensial yang bermakna bagi konteks lokal dan masa depan siswa (kemandirian, kreativitas, kolaborasi). Secara pedagogis, kurikulum merdeka mendorong pembelajaran aktif (berbasis proyek, inkuiri), diferensiasi konten/proses/produk, dan perhatian eksplisit pada KSE. Memberikan guru peran sebagai desainer pembelajaran memungkinkan penyesuaian taksonomi tujuan sesuai kesiapan siswa.

Keterbatasan yang terjadi adalah diperlukan landasan filosofis yang berarti interpretasi “merdeka” sebab dapat menyebabkan penafsiran yang bervariasi. Tanpa adanya penguatan pedoman normatif, akan terjadi kemungkinan distorsi tujuan sehingga persepsi publik sebaliknya yaitu menurunkan standar mutu pendidikan. Keterbatasan secara pedagogis pada kurikulum merdeka diantaranya Praktik pelatihan mempelajari keterampilan diagnostik, perencanaan, dan sumber belajar yang lebih tinggi; banyak guru yang belum siap, Risiko praktik simbolik: sekolah mungkin “melakukan proyek” tanpa perencanaan instruksional yang mendalam sehingga hasil belajar kognitif tidak meningkat.

Jika dianalisis melalui pendekatan kebijakan dan tata kelola kurikulum, K-13 menonjol sebagai kebijakan kurikuler murah dengan pedoman implementasi nasional yang relatif seragam. Sedangkan kurikulum merdeka menempatkan otonomi pada sekolah atau guru dengan didukung program kebijakan seperti sekolah penggerak. Keterbatasan dari kebijakan yaitu otonomi tanpa kapasitas atau anggaran akan memperselebar ketimpangan. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas adaptif yang jelas dapat menimbulkan inkonsistensi implementasi antar daerah. Sehingga seharusnya kebijakan dengan merencanakan kerangka terkait otonomi bertanggung jawab serta dukungan teknis atau keuangan bertarget khususnya daerah 3T.

Perbedaan penting yaitu peran guru yang terlihat bukan hanya sebagai pelaksana tetapi menjadi *agen of change* (agen perubahan) pada program guru penggerak. Diakui bahwa program Guru Penggerak meningkatkan literasi pedagogis lanjutan (pelatihan, praktik reflektif) dan membangun kepemimpinan pembelajaran (Daga, 2021). Tetapi adanya keterbatasan implementasi di lapangan terkait Skala peserta yang terbatas dan efek seleksi (guru termotivasi yang sudah lebih baik) berarti dampak sistemik belum terjamin. Selain itu, beban kerja dan beban administratif tanpa mempengaruhi keberlanjutan. Jika guru dibebankan banyak administrasi maka dikhawatirkan pada psikologis guru sangat berpengaruh dalam memberikan pendekatan pembelajaran yang nyata pada peserta didik menurun (Faridahtul Jannah, Thooriq Irtifa' Fathuddin, & Putri Fatimatus Az Zahra, 2022). Bahkan akan cenderung untuk menyelesaikan penugasan administrasi sehingga berdampak pada siswa dalam belajar bersama guru.

Kurikulum Merdeka memberi arahan rekonstruksi yang menjanjikan: pembelajaran kontekstual, penguatan KSE, diferensiasi, dan keterkaitan dunia nyata. Ia lebih relevan untuk menyiapkan peserta didik menghadapi masa abad-21. Namun hakikat reformasi bukan sekadar kebijakan kurikulum yang menuntut kapasitas guru, infrastruktur investasi, sistem penilaian yang produktif, dan kebijakan pendukung keadilan. Rekonstruksi yang efektif akan menggabungkan kekuatan kedua model dengan mempertahankan standar minimal nasional (agar mutu terjaga) sambil memberi otonomi bertanggung jawab kepada guru pembelajaran untuk berinovasi dan membuktikan praktik terbaik yang kemudian disistematisasikan.

B. Tantangan dan Kesenjangan Implementasi

Implementasi kebijakan merdeka belajar memang sangat baik adanya perubahan, tetapi masih terdapat kesenjangan yang terjadi di lapangan. Kesenjangan dan tantangan harus menjadi bahan evaluasi untuk penyelarasan program pendidikan yang merata untuk peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa kesenjangan dalam implementasi sebagai berikut:

1. Kesiapan Guru Terhadap Transisis Cepat

Kesiapan guru menjadi sangat penting sebagai seorang pelaksana di lapangan. Tetapi mayoritas banyak guru bingung menerjemahkan fleksibilitas ke praktik. Sehingga masih saja bersifat sekedar formalitas saja tanpa adanya langkah aktualisasi nyata (Retnaningrum et al., 2023). Kesiapan guru (kesiapan guru) dipandang sebagai komponen kunci dalam teori perubahan pendidikan: kapasitas, pemahaman konsep, dan sikap guru menentukan apakah kurikulum yang dimaksudkan (kurikulum yang dirancang) diterjemahkan menjadi kurikulum yang dilaksanakan yang bermakna di kelas.

Fullan menekankan bahwa perubahan kurikulum memerlukan pembangunan kapasitas (peningkatan kapasitas) dan makna baru (makna baru) pada aktor utama (guru dan kepala sekolah) (Kawuryan, Sayuti, Aman, & Dwiningrum, 2021). Jika guru hanya mendapat dokumen kebijakan tanpa pengembangan profesional yang berkelanjutan (*coaching, lesson study, video coaching*), implementasinya mudah menjadi dangkal . Survei dan kajian kasus pada implementasi kurikulum baru menunjukkan tema berulang: guru membingungkan menerjemahkan kurikulum menjadi praktik pembelajaran yang konkret tanpa contoh-contoh, model RPP adaptif, atau pendampingan intensif . Studi tentang kesiapan guru di konteks Kurikulum Merdeka juga melaporkan kekurangan pemahaman konsep dan kebutuhan pendidikan yang terstruktur.

2. Ketimpangan Sarana dan Prasarana Digitalisasi Pendidikan

Ketimpangan sangat bisa terjadi terletak pada sekolah di perkotaan lebih mudah berinovasi, sedangkan daerah 3T kesulitan. Dampak yang terjadi di lapangan berpotensi memperlebar kesenjangan pembelajaran, menurunkan peluang siswa di daerah 3T memperoleh pengalaman P5/PjBL yang autentik, dan mengurangi efektivitas intervensi kurikulum yang mengandalkan akses digital atau sumber belajar eksternal . Studi Indonesia terbaru menegaskan perbedaan signifikan antara layanan pendidikan di kota dan desa terkait infrastruktur dan kesempatan pengembangan guru.

Ketimpangan sarana dan prasarana dalam pendidikan merujuk pada perbedaan akses dan kualitas fasilitas fisik (kelas, laboratorium, perpustakaan, alat praktik), infrastruktur digital (komputer, internet, platform e-learning), serta tenaga pendukung (jumlah guru, keahlian, distribusi geografis) antar sekolah di wilayah berbeda (misalnya perkotaan vs 3T). Dampak digitalisasi sekolah 3T di Era Pandemi Covid-19 terletak di lokasi sekolah di wilayah 3T di Flores, Nusa Tenggara Timur. Adanya temuan penelitian sekolah 3T mengalami tantangan infrastruktur yang terbatas saat pembelajaran berani (*digitalisasi*) (Rahmawati & Wolo, 2022). Meskipun sebagian guru menyatakan digitalisasi berdampak positif, ada juga bagian yang menyebut melemahkan perangkat yang memadai, melemahkan koneksi internet stabil.

Transformasi pendidikan dengan kurikulum merdeka di lokasi SMP (Sekolah Menengah Pertama) di wilayah pedesaan. Guru dan siswa menyebut tantangan utama adalah keterbatasan sarana digital dan teknologinya, fasilitas komputer/internet yang kurang, serta kesiapan guru yang belum mendukung. Meskipun ada upaya adaptasi (menggunakan media non-digital, konteks lokal), hambatan fisik dan teknologi mengurangi kebebasan dalam memilih metode dan inovasi kelas (Pratiwi, 2025). Digitalisasi dan ketimpangan pendidikan yang terjadi di SD (Sekolah Dasar) di Kecamatan Baraka, Sulawesi Selatan. Adanya penelitian yang menunjukkan bahwa Kebijakan digitalisasi menjadi tidak merata karena beberapa SD tidak memiliki akses perangkat, infrastruktur internet, atau guru pelatihan yang memadai. Guru yang berada di sekolah dengan akses terbatas merasakan bahwa Merdeka Belajar cenderung idealis tanpa dukungan fisik yang memadai (Anita & Astuti, 2022).

Keterampilan Abad 21 siswa sekolah dasar di daerah 3T terhambat, adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa siswa di sekolah 3T menunjukkan skor keterampilan abad-21 (kreativitas, komunikasi, kolaborasi) yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan siswa di sekolah kota/sekolah dengan akreditasi lebih tinggi. Salah satu faktor yang termasuk adalah fasilitas pendukung pembelajaran (alat, fasilitas digital, sarana belajar tambahan) yang kurang (Daga, Wahyudin, & Susilana, 2022).

Dari beberapa hasil penelitian menjadi bahan evaluasi klasifikasi menurut skala prioritas. Digitalisasi pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan sarana dan prasarana yang signifikan. Perbedaan infrastruktur, akses internet, perangkat digital, dan dukungan teknis antara perkotaan dan 3T membuat implementasi Merdeka Belajar belum setara. Tanpa kebijakan afirmatif (alokasi khusus, pelatihan guru, teknologi adaptif untuk daerah terbatas), digitalisasi justru berisiko memperdalam *kesenjangan pembelajaran* antar wilayah.

Harapannya kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat, memang yang menjadi kendala adalah struktur geografis Indonesia. Namun, permasalahan ketimpangan yang terjadi dapat diatasi dengan regulasi serta program prioritas cepat dari pemerintah pusat. Jika tidak adanya kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, maka ketidakpastian guru dalam mengimplementasikan.

3. Evaluasi jangka panjang belum jelas

Kebijakan merdeka belajar merupakan kebijakan yang masih relatif baru, dampaknya pada kualitas lulusan belum terukur penuh. Kurikulum Merdeka masih relatif baru (diluncurkan 2020, diperkuat 2022), sehingga berdampak pada jangka panjang terhadap mutu lulusan, keterampilan abad-21, dan kesetaraan pendidikan belum dapat diukur sepenuhnya (Sephiawardani & Bektiningsih, 2023). Evaluasi kurikulum idealnya dilakukan melalui studi longitudinal (penelitian jangka panjang), yaitu melacak perkembangan siswa dari awal hingga lulus dan masuk dunia kerja. Saat ini, data semacam itu belum tersedia. Evaluasi saat ini cenderung berbasis implementasi (seberapa banyak sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka, kesesuaian perangkat ajar, kesiapan guru). Namun evaluasi terhadap output (prestasi akademik, literasi, numerasi) dan outcome (profil lulusan, kesiapan kerja, karakter) masih minim.

Sebagai contoh, Asesmen Nasional hanya mengukur literasi, numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar belum cukup untuk menilai dampak penuh kurikulum pada jangka panjang. Dampak lain yang terjadi adalah ketidakpastian kualitas lulusan apakah lulusan Kurikulum Merdeka lebih adaptif, kreatif, dan berkarakter dibandingkan K-13 belum terbukti dengan data longitudinal. Kebijakan trial and error : evaluasi tanpa pengukuran, ada kebijakan risiko berubah lagi sebelum dampak nyata bisa diukur, sehingga menambah beban guru dan siswa (Kause, Nubatonis, Faot, & Santos, 2025). Implementasi kesenjangan : sekolah dengan fasilitas lengkap mungkin menunjukkan hasil positif lebih cepat, sementara sekolah 3T tertinggal. Jika evaluasi tidak mencakup konteks, keselarasan ini bisa tidak terlihat.

SIMPULAN

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah strategis dalam rekonstruksi pendidikan nasional Indonesia untuk menjawab kebutuhan abad ke-21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberi pendinginan pada iklim, menekan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, serta mendorong peran guru dan sekolah sebagai agen transformasi. Kebijakan ini menekankan penegakan kurikulum, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, peran guru strategi penggerak, serta penerapan asesmen nasional yang lebih komprehensif. Implementasi kurikulum merdeka terbukti memberikan ruang lebih besar bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri, kreatif, dan sesuai dengan potensi individunya.

Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa kesiapan guru yang beragam, keterbatasan sarana-prasarana terutama di daerah 3T, serta ketiadaan evaluasi jangka panjang terhadap kualitas lulusan. Penelitian ini belum secara penuh membahas efektivitas program pendukung seperti Guru Penggerak, Sekolah

Penggerak, maupun integrasi digitalisasi pendidikan dalam konteks pemerataan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian longitudinal mengenai dampak jangka panjang Kurikulum Merdeka, analisis kesiapan guru di berbagai wilayah, serta kajian lebih mendalam mengenai strategi afirmatif untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anita, A., & Astuti, S. I. (2022). Digitalisasi Dan Ketimpangan Pendidikan: Studi Kasus Terhadap Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Baraka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2509>
2. Arma, & Ismail. (2024). Analisis Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progresivisme. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keagamaan*, 21(3), 1034–1053. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri Article>
3. Cahya, U. D., Simarmata, J., Iwan, Suleman, N., Nisa, K., Nasbey, H., ... Rahmadani, E. (2023). Inovasi pembelajaran berbasis digital abad 21. In *Penerbit Yayasan Kita Menulis*.
4. Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
5. Daga, A. T., Wahyudin, D., & Susilana, R. (2022). The 21st Century Skills of Elementary School Students in 3T Regions (Frontier, Outermost, and Least Developed Regions). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 8(4), 817. <https://doi.org/10.33394/jk.v8i4.6239>
6. Darlis, A., Sinaga, A. I., Perkasyah, M. F., Sersanawawi, L., & Rahmah, I. (2022). Pendidikan Berbasis Merdeka Belajar. *Journal Analytica Islamica*, 11(2), 393–401. <https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.14101>
7. Faridahtul Jannah, Thooriq Irtifa' Fathuddin, & Putri Fatimattus Az Zahra. (2022). Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar 2022. *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 55–65. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i2.36>
8. Gouédard, P., Pont, B., Hyttinen, S., & Huang, P. (2020). Curriculum reform: A literature review to support effective implementation. *OECD Education Working Papers*, (239), 5–59.
9. Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian filosofis, teoritis dan aplikatif* (1st ed.). Malang: CV. Literasi Nusantara.
10. Hattarina, S., Saila, N., Faradila, A., Putri, D. R., & Putri, R. G. A. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Lembaga Pendidikan. *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)*, 1.
11. Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. *E-Tech*, 08(01), 1–29. <https://doi.org/10.1007/XXXXXX-XX-0000-00>
12. Jaenudin, R., Chotimah, U., Farida, F., & Syarifuddin, S. (2020). Student Development Zone: Higher Order Thinking Skills (Hots) in Critical Thinking Orientation. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 11–19. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1884>
13. Kause, D. H. B., Nubatonis, B. E., Faot, F., & Santos, J. Dos. (2025). Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar: Tantangan dan Peluang dalam Implementasi di Sekolah Menengah Pertama. *Arini: Jurnal Ilmiah Dan Karya Inovasi Guru*, 2(1), 50–64. <https://doi.org/10.71153/arini.v2i1.313>
14. Kawuryan, S. P., Sayuti, S. A., Aman, & Dwiningrum, S. I. A. (2021). Teachers Quality and Educational Equality Achievements in Indonesia. *International Journal of Instruction*, 14(2), 811–830. <https://doi.org/https://doi.org/10.29333/iji.2021.14245a>
15. Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.;

- M. H. Seawell, ed.). London: SAGE Publications.
16. Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
 17. Majid, M. A. (2024). Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Meretas Upaya Antisipatif Di Tengah Optimisme Implementatif. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(1), 12–25. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i1.1288>
 18. Muhammad Rusli, B. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205. Retrieved from <https://www.e-journal.my.id/jsgp/article/view/591>
 19. Nadia, D. O., Desyandri, & Erita, Y. (2022). Merdeka Belajar Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivisme. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 07(02), 878–887. <https://doi.org/10.24945/mvf.05.22.1866-0533.2443>
 20. Ningrum, A. R., & Suryani, Y. (2022). Peran Guru Penggerak dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 219. <https://doi.org/10.29240/jpd.v6i2.5432>
 21. Novayanti, N., Warman, W., & Dwiyono, Y. (2023). Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 151–160. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2965>
 22. Pahru, S., & Latif, A. (2022). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Indonesia dan Relevansinya dengan Era Distrupsi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2536–2545. Retrieved from <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3897>
 23. Pratiwi, W. R. (2025). Transforming Education with the " Merdeka Belajar Curriculum : Digging into Challenges and Crafting Effective Strategies in Rural Indonesia. *Academic Journal of English Language and Education*, 9(1), 111–128. <https://doi.org/10.29240/ef.v9i1>
 24. Rahmawati, A. S., & Wolo, D. (2022). Effect of 3T School Digitalization in the Era of the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 8(1), 341–345. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v8i1.1180>
 25. Retnaningrum, E., Widyatiningtyas, R., Sari, A. R., Sapulete, H., Solissa, E. M., & Sujana, I. G. (2023). Teacher's Paradigm in Interpreting the Birth of the Merdeka Curriculum Policy. *Journal of Education Research*, 4(2), 435–442. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i2.174>
 26. Sadewo, Y. D., Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. (2022). Persepsi, Kebutuhan Dan Tantangan Implementasi Kebijakan "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Perbatasan. *Sebatik*, 26(2), 768–773. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.1980>
 27. Sephiawardani, N. A., & Bektiningsih, K. (2023). Review of Teacher Readiness in Implementing Merdeka Curriculum at Public Elementary Schools. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 56(3), 533–542. <https://doi.org/10.23887/jpp.v56i3.67628>
 28. Setiawan, R. B., Sholeh, M., Nurrahman, A., & Nurfatmawati, L. (2023). Literasi Proyek Profil Pelajar Pancasila dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Lembaga TK. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7030–7040. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5435>
 29. Sumarmi, S. (2023). Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. *Social Science Academic*, 1(1). <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.3193>
 30. Wati, F., Kabariah, S., & Adiyono. (2022). Penerapan Model-Model Pengembangan Kurikulum Di Sekolah. *ADIBA: Journal of Education*, 2(4), 627–635.
 31. Windayanti, W., Afnanda, M., Agustina, R., Kase, E. B. S., Safar, M., & Mokodenseho, S. (2023). Problematika Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka. *Journal on Education*, 6(1), 2056–2063. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3197>

PROFIL SINGKAT

Shindid Gunagraha adalah mahasiswa pascasarjana, program studi magister pendidikan agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Selain itu, bekerja sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara dan Pondok Pesantren Aitam Indonesia 2 Ngawen Klaten. Fokus penelitian pada kajian studies Islam dan pendidikan fokus utama ialah kajian moderasi beragama dalam dunia pendidikan, aktualisasi ekologi dalam pendidikan Islam.

Rustam Ibrahim adalah penulis yang berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.